

BAB V

KESIMPULAN, PEMBAHASAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Di dalam bab ini secara berturut-turut dikemukakan:

(a) kesimpulan yang ditarik dari studi pustaka dan hasil pengolahan data lapangan, (b) pembahasan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh, (c) implikasi yang dikembangkan dari hasil-hasil pembahasan, dan (d) rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan dan implikasi yang dikembangkan.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diajukan ini ditarik dari hasil studi pustaka dan hasil pengolahan data lapangan. Hasil studi pustaka merupakan jawaban pertanyaan penelitian nomor satu yang berbunyi: "Bagaimanakah konsep-konsep pokok prinsip-prinsip bimbingan itu di negeri asalnya (Amerika Serikat)?" Sedang hasil studi lapangan merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan lainnya, yaitu pertanyaan nomor dua sampai dengan delapan. Kesimpulan-kesimpulan itu sebagai berikut.

1. Konsep-konsep pokok prinsip-prinsip bimbingan

Berdasarkan pembahasan terhadap literatur yang dapat dihimpun penyusun sebagaimana dilaporkan dalam bab latar belakang teori di muka, diperoleh kesimpulan tentang konsep-konsep pokok prinsip-prinsip bimbingan sebagai berikut:

Pertama, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu bukan hanya dipandang sebagai dasar kehidupan politik, melainkan juga dipandang sebagai "way of life".

Bimbingan merupakan aplikasi prinsip demokrasi dalam dunia pendidikan.

Kedua, bimbingan untuk semua. Yang berhak memperoleh layanan bimbingan bukan hanya kelompok-kelompok khusus, melainkan setiap mahasiswa yang memerlukannya.

Ketiga, mengakui dan menghormati perbedaan individu. Bimbingan membantu perkembangan pribadi terbimbing sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan terbimbing.

Keempat, pribadi seutuhnya. Bimbingan bukan hanya membantu perkembangan intelektual, melainkan keseluruhan dimensi-dimensi pribadi secara utuh.

Kelima, interdisiplin. Bimbingan bukan hanya mengaplikasikan salah satu cabang ilmu, melainkan berbagai cabang ilmu yang dapat membantu upaya bimbingan.

Keenam, bimbingan bagian integral pendidikan. Prinsip ini menempatkan pendidikan sebagai induk bimbingan. Dengan demikian tujuan umum pendidikan juga merupakan tujuan bimbingan.

Ketujuh, berpusat pada terbimbing. Dengan prinsip ini, para pembimbing mengutamakan kepentingan dan perkembangan pribadi terbimbing, bukan kepentingan diri pembimbing.

2. Hasil studi lapangan

Berdasarkan hasil pengolahan data lapangan dan pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

a. Penerapan prinsip-prinsip bimbingan oleh para dosen pembimbing mencapai tingkat antara mekanis dan rutin.

b. Para dosen pembimbing telah memiliki sikap positif terhadap bimbingan.

c. Para dosen pembimbing memiliki orientasi nilai budaya yang positif.

d. Terdapat variasi tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan, sikap terhadap bimbingan, dan orientasi nilai budaya para dosen pembimbing pada beberapa perguruan tinggi negeri.

e. Semakin positif sikap terhadap bimbingan dan orientasi nilai budaya para dosen pembimbing, semakin tinggi tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan yang mereka lakukan.

f. Orientasi nilai budaya mempunyai sumbangan terhadap tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan lebih menonjol dibanding sumbangan dari sikap terhadap bimbingan. Meskipun demikian, sumbangan sikap terhadap bimbingan tidak dapat diabaikan.

B. Pembahasan

Di dalam pembahasan ini, kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas diangkat kembali satu persatu untuk diamati dengan pengamatan yang lebih luas, yaitu dengan mengamati kaitannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan di muka dan kenyataan-kenyataan aktual di dalam masyarakat, bahkan dengan pemikiran-pemikiran dan harapan-harapan.

1. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi sebagai suatu pandangan hidup telah diterima oleh semua bangsa, termasuk bangsa

Indonesia. Esensi demokrasi ialah ikut sertanya warga masyarakat di dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya dikenal oleh kaum terpelajar, melainkan juga oleh masyarakat pedesaan (Priyono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Priyono, 1983). Sebagai suatu bangsa, Indonesia bahkan telah merasakan sendiri makna dari beberapa praktek demokrasi seperti "demokrasi liberal", "demokrasi terpimpin", dan terakhir "demokrasi Pancasila". Pengalaman itu dialami juga oleh para dosen pembimbing. Dengan kata lain, demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi para dosen pembimbing. Yang mungkin perlu dipertanyakan ialah bukannya menerapkan prinsip demokrasi atau bukan demokrasi, melainkan sampai taraf mana demokrasi itu diterapkan di dalam mereka membimbing para terbimbing.

2. Bimbingan untuk semua

Secara ideal, prinsip bimbingan untuk semua itu pada umumnya telah disepakati. Akan tetapi mengingat keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, prinsip itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sebagai contoh, pelaksanaan bimbingan di Institut Pertanian Bogor masih terbatas pada para mahasiswa tingkat pertama; sedang di Universitas Gajah Mada masih terbatas kepada mahasiswa yang menyatakan dirinya bermasalah (Roosdi AS, 1983). Kenyataan inilah yang sebenarnya belum memenuhi harapan pelaksanaan bimbingan untuk semua. Pada umumnya setiap mahasiswa mempunyai masalah, akan tetapi tidak jarang di antara mereka enggan (Jawa: pekewuh) menyampaikan kepada dosen atau

dosen pembimbingnya (Robinson, 1950). Kenyataan lain yang mendukung perlunya penerapan prinsip bimbingan untuk semua, tidak jarang sarjana tamatan perguruan tinggi yang menganggur. Kenyataan itu mungkin akan lain apabila kepada mahasiswa, lebih-lebih yang hampir tamat, memperoleh layanan bimbingan karir atau bimbingan pekerjaan. Dengan bimbingan karir atau bimbingan kerja bukan hanya terjadi proses penyesuaian antara bakat, minat, dan keterampilan yang dimiliki seseorang dengan lapangan kerja yang tersedia, melainkan juga kemungkinan-kemungkinan penciptaan lapangan kerja yang baru (Bulletin International Association of Educational and Vocational Guidance, September 1-5, 1980).

3. Mengakui dan menghormati perbedaan individu

Di dalam proses bimbingan di Amerika Serikat, prinsip ini telah jauh dikembangkan, antara lain dengan mengembangkan berbagai pengukuran baik yang bersifat tes maupun yang bukan tes untuk melayani perkembangan pribadi para mahasiswa (Traxler dan North, 1968). Alat-alat pengukuran semacam itu dikalangan para dosen pembimbing di perguruan tinggi khususnya, dan sekolah-sekolah pada umumnya, masih merupakan barang-barang yang langka untuk dapat dimiliki atau digunakannya. Titik lemah ini, dapat juga diamati dari sudut nilai budaya. Sejak di tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah atas, mereka telah dibiasakan mengutamakan kebersamaan dibanding penonjolan individu, antara lain mereka dibiasakan menggunakan pakaian seragam pada hari-hari yang telah ditentukan. Gejala seperti itu sebenarnya dilatar belakangi nilai budaya yang oleh para

budayawan kita (tanpa perlu menyebut nama-nama) disebut sebagai "kebersamaan" dengan konotasi yang berbeda-beda.

Masalah perbenturan antara kemandirian dengan kebersamaan itu sebenarnya bukanlah masalah yang baru, itulah kenyataan yang bergulat sepanjang sejarah manusia, dan itu pulalah yang menjadi kunci pembahasan apabila orang ingin membedakan budaya Barat dan Timur, di mana yang satu mengutamakan individu sedang yang lain mengutamakan kebersamaan (To Thi Anh, 1984 ; Vaughan, 1975).

Penyusun cenderung agar orang Barat belajar ke Timur dalam beberapa hal, tetapi dalam hal mengakui dan menghormati perbedaan individu itu, seyogyanya orang Timur belajar ke Barat.

4. Pribadi seutuhnya

Prinsip pribadi seutuhnya, untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pendidik, bukanlah merupakan penemuan baru seperti yang diungkapkan oleh Williamson dengan istilah "wholeness". Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, telah lama mencanangkan semboyan "cipta, rasa, dan karsa" (Dewantara, 1967, h.82).

Lebih-lebih dengan lajunya upaya penataran P4, nampaknya prinsip pribadi seutuhnya telah cukup dihayati oleh para dosen pembimbing. Mungkin di antaranya ada yang "overacting" dengan predikat ilmiah mendewakan kematangan intelek seperti lazimnya perguruan tinggi di Barat sebelum Williamson. Jika ada yang demikian, itulah kesempatan bagi dosen pembimbing untuk melancarkan misinya.

5. Prinsip interdisiplin

Prinsip interdisiplin ini sebenarnya muncul sebagai antitesa terhadap proses spesialisasi dalam bidang keilmuan, khususnya ilmu-ilmu sosial, di samping kenyataan bahwa perubahan-perubahan di dalam masyarakat berlangsung dengan cepat, dan masalah-masalah yang dihadapi manusia semakin kompleks. Disadari bahwa masalah-masalah manusia tidak mungkin dihadapi oleh sesuatu cabang ilmu tertentu, melainkan seyogyanya dihadapi oleh berbagai cabang ilmu. Apabila upaya bimbingan menghadapi masalah "susah mencari kerja", pembimbing tidak cukup dengan mengandalkan psikologi, pendidikan, atau penyusunan kurikulum baru, melainkan perlu bantuan ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi, bahkan politik.

Mengembangkan prinsip interdisiplin itu mungkin untuk masyarakat perguruan tinggi di Indonesia tidak terlalu sulit, oleh karena didukung oleh budaya "gotong-ro-yong" yang merupakan akar dari pandangan hidup Indonesia. Masalah yang perlu dikembangkan barang kali hanyalah masalah kesempatan dan mekanisme komunikasinya.

6. Bimbingan bagian integral pendidikan

Prinsip ini menempatkan pendidikan sebagai induk bimbingan. Upaya-upaya bimbingan merupakan bantuan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan di Indonesia, prinsip itu telah diterima secara aklamasi, tanpa ada yang menyanggah. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kehadiran bimbingan, khususnya para pembimbing, di lembaga-lembaga pendidikan itu diterima

dengan tangan terbuka oleh semua pihak (Jones, 1977).

Di perguruan tinggi di Indonesia layanan bimbingan belum dipandang sebagai layanan profesional atau sebagai bagian dari layanan pendidikan, melainkan masih dipandang sebagai tugas "sampiran", baik dilihat dari pengadaannya tenaganya, maupun dari anggaran pembiayaannya.

Kenyataan itu memberi isyarat agar orang tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa para dosen pembimbing tidak mampu menerapkan prinsip di atas.

7. Berpusat pada terbimbing

Prinsip ini menempatkan terbimbing sebagai yang dipentingkan dalam hubungan pembimbing dan terbimbing. Pembimbing yang baik, bukannya bekerja untuk kepentingan atau kepuasan pribadinya dengan mengorbankan terbimbing, melainkan bekerja keras bersama terbimbing demi keberhasilan terbimbing. Kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah semua dosen pembimbing dapat melaksanakan dengan mudah prinsip itu. Tidak jarang terjadi bahwa dengan dibimbing, si terbimbing justru menjadi semakin mengidap ketergantungan kepada pembimbing. Oleh karena itu dituntut pada setiap pembimbing untuk secara terus menerus meningkatkan keterampilannya di dalam melaksanakan tugas bimbingan, agar kualitas layanannya dapat mendekati penerapan prinsip itu. Harapan yang seyogyanya dimiliki oleh setiap pembimbing yang baik ialah bahwa pada akhirnya terbimbing mampu membimbing dirinya sendiri.

8. Penerapan prinsip-prinsip bimbingan oleh para dosen

pembimbing mencapai tingkat antara mekanis dan rutin.

Apabila kesimpulan itu dilihat dari skala tingkat penerapan yang berskala delapan, maka pencapaian sampai pada skala antara tiga dan empat itu, dapat dikatakan penerapannya masih rendah, sesuai dengan istilahnya masih tingkat mekanis dan rutin. Artinya para dosen pembimbing bekerja tanpa kreativitas untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dan produktif.

Tetapi jika diperhatikan bahwa ide bimbingan itu diterima secara formal di lingkungan perguruan tinggi baru pada tahun 1980, maka kesimpulan yang lebih tepat ialah bahwa para dosen pembimbing telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip bimbingan pada tingkat mendekati rutin. Menurut ungkapan orang Jawa: "wis pira-pira", yang maksudnya dengan kondisi dan situasi yang belum kondusif para dosen pembimbing itu telah dapat mencapai tingkat tertentu, yang mungkin jika orang lain yang mengerjakannya tingkatannya baru sampai orientasi saja.

9. Para dosen pembimbing telah memiliki sikap positif terhadap bimbingan. Kesimpulan itu apabila dilihat dari skala yang digunakan, memang sudah tepat, hanya belum sampai sikap yang sangat positif. Jika dianggap bahwa para dosen pembimbing itu para pembimbing profesional, seharusnya sikap mereka sangat positif. Tetapi oleh karena sebagian besar dosen pembimbing adalah dosen bidang studi bukan bimbingan, kesimpulan itu memang harus demikian.

10. Para dosen pembimbing memiliki orientasi nilai budaya yang

positif. Kesimpulan itu jika ditelusur kembali pada pengembangan skala orientasi nilai budaya yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diartikan bahwa para dosen pembimbing berpandangan hidup yang tidak fatalis, memandang pekerjaan sebagai suatu kewajiban hidup, berorientasi ke masa depan, tidak terlalu terikat kepada alam, dan berhubungan dengan sesama manusia secara demokratis.

Meskipun demikian belum dapat dikatakan sangat positif sesuai dengan harapan-harapan masyarakat yang memandang perguruan tinggi sebagai pengemban perubahan atau sebagai wahana kemajuan. Masyarakat Indonesia dewasa ini tidak lagi berkiblat ke istana para raja, dan tidak pula ke pondok-pondok atau ke padepokan-padepokan, melainkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah sumber nilai budaya bangsa.

11. Terdapat variasi tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan, sikap terhadap bimbingan, dan orientasi nilai budaya para dosen pembimbing pada beberapa perguruan tinggi. Mengenai variasi tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan sikap terhadap bimbingan, nampaknya sesuai dengan latar belakang teori yang melaporkan bahwa tidak terdapat perkembangan yang seragam pada berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Kecuali itu, pola bimbingan yang diterapkan di IPB, UGM, IKIP Yogyakarta, dan UNS memang tidak seragam. Dan ditambah lagi latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka berbeda satu dengan lainnya. Apabila di IPB menampakkan peringkat yang sedikit di bawah dibanding dengan di UGM, IKIP Yogyakarta, dan

UNS, hal itu logis karena para dosen pembimbing di IPB berlatar belakang pendidikan eksakta.

Mengenai keragaman orientasi nilai budaya yang memperlihatkan bahwa di UGM, IKIP Yogyakarta, dan UNS Surakarta memperlihatkan peringkat yang tidak berbeda, juga dapat dipahami oleh karena dengan mudahnya perhubungan dan majunya komunikasi, ketiga perguruan tinggi itu seakan-akan berada di bawah satu atap saja.

12. Semakin positif sikap terhadap bimbingan dan orientasi nilai budaya, semakin tinggi tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan. Kesimpulan ini sudah cukup jelas. Sebaliknya semakin rendah sikap terhadap bimbingan dan orientasi nilai budaya, semakin rendah pula penerapan prinsip-prinsip bimbingan.

13. Orientasi nilai budaya mempunyai sumbangan terhadap penerapan prinsip-prinsip bimbingan lebih menonjol dibanding sumbangan dari sikap terhadap bimbingan. Meskipun demikian, sumbangan sikap terhadap bimbingan tidak dapat diabaikan. Kesimpulan ini sejalan dengan penemuan Smith yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai sentral individu sangat penting dalam menentukan komponen-komponen kognitif sikapnya (Smith, dikutip Krech dkk, 1962).

Di samping itu, sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang teori, prinsip-prinsip bimbingan diturunkan dari falsafah dan nilai-nilai profesional bimbingan, maka wajarlah apabila orientasi nilai budaya lebih menonjol sumbangannya terhadap penerapan prinsip-prinsip

bimbingan. Kesimpulan bahwa sumbangan sikap terhadap bimbingan kepada penerapan prinsip-prinsip bimbingan tidak dapat diabaikan, sejalan dengan paradigma Newcomb dkk (1965:68) yang melukiskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap dan situasi temporal.

Demikianlah pembahasan terhadap kesimpulan-kesimpulan penelitian baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan.

C. Implikasi

Memperhatikan kesimpulan-kesimpulan beserta pembahasannya sebagaimana dikemukakan di atas, penyusun melihat implikasi penelitian ini dalam tiga aspek, yaitu:

(1) aspek konseptual, (2) aspek pengembangan, dan (3) aspek penelitian.

1. Aspek Konseptual

Dalam pembahasan kesimpulan nomor satu sampai dengan nomor tujuh (kesimpulan hasil studi pustaka), terungkap bahwa di antara ketujuh prinsip bimbingan itu terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia, dan terdapat pula yang tidak sejalan. Oleh karena prinsip-prinsip bimbingan itu merupakan pedoman penyusunan program dan kegiatan bimbingan, hal itu mengundang atau merangsang pemikiran, sekurang-kurangnya bagi penyusun, untuk menyusun konsep prinsip-prinsip bimbingan yang diusulkan agar menjadi pedoman dari mayoritas dosen pembimbing di Indonesia. Akan sangat berharga apabila penyusunan konsep prinsip-

prinsip itu dilandasi penelitian-penelitian dari dunia profesi bimbingan di Indonesia, dan pergeseran-pergeseran nilai budaya Indonesia yang terjadi oleh adanya persilangan-persilangan budaya dengan budaya-budaya bangsa lain. Suatu seminar mengenai masalah ini yang dilakukan oleh para dosen pembimbing, baik tingkat nasional, maupun regional ASEAN, nampaknya akan sangat bermanfaat.

2. Aspek Pengembangan

Penelitian ini antara lain menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip bimbingan oleh para dosen pembimbing mencapai tingkat antara mekanis dan rutin. Bagaimanapun juga alasannya tingkat penerapan seperti itu masih perlu dipertanyakan: "mengapa demikian"?

Penelitian juga mengungkapkan bahwa orientasi nilai budaya mempunyai sumbangan yang menonjol terhadap penerapan prinsip-prinsip bimbingan itu. Di dalam pembahasan nampak bahwa terdapat titik lemah pada "pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan individu", dan hal itu menyangkut nilai budaya Indonesia yang cukup mendasar perbedaannya dengan nilai budaya Amerika Serikat. Di sini timbul problema bagi para pembimbing, yaitu apakah nilai budaya yang perlu digeser ataukah prinsip-prinsip bimbingan yang perlu dimodifikasi? Kedua-duanya bukan masalah ringan, karena nilai budaya merupakan sesuatu yang berurat berakar di dalam jiwanya masyarakat dan memerlukan waktu lama bagi perubahannya. Dan lagi apabila nilai budaya itu telah merupakan kebanggaan nasional, justru harus dilestarikan. Pilihan yang kedua, yaitu dengan memodifikasi prinsip

bimbingan itu. Langkah ke arah ini juga cukup berat, mengingat bahwa prinsip itu telah didukung oleh penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan ilmiah yang cukup panjang usianya.

Jalan keluar dari dilema tersebut di atas, mungkin dapat diketemukan di dalam dunia filsafat. Tetapi jalan ini diakui bersifat spekulasi. Masyarakat Indonesia mempunyai falsafah hidup "kerukunan" atau tepatnya senang kompromi. Orang Jawa mengungkapkan falsafah itu dalam pembicaraan sehari-hari "ngono ya ngono, ning mbok aja ngono ... apike priye?". Di dalam falsafah China dikenal falsafah "Yin Yang". Di dalam Yin yang paling gelap itu toh terdapat setitik cahaya Yang, sedang di dalam Yang yang terang benderang itu terdapat secercah titik gelap dari Yin. Jika di Indonesiakan ungkapan Jawa itu kira-kira: "Begitu ya begitu, tetapi janganlah persis begitu... baiknya bagaimana?". Dengan budaya kompromi itu nilai budaya kebersamaan dapat digeser ke dalam prinsip "mono-dualis", yaitu prinsip yang memandang sejajar antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Jika jalan kompromi ini yang ditempuh, maka konsekuensinya, hendaklah dilakukan penelitian-penelitian bagaimana dampaknya terhadap keberhasilan bimbingan.

Titik lemah yang kedua, ialah pada prinsip mengutamakan kepentingan terbimbing, atau tepatnya "client-centered". Prinsip ini sebenarnya dengan istilah lain sudah lama dikenal di Indonesia, yaitu "tut wuri handayani". Akan tetapi nampaknya semboyan itu belum diterapkan di

dalam hubungan pembimbing dengan terbimbing. Di sini masalahnya terletak dalam daerah psikologi, yaitu bagaimana memberi motivasi agar prinsip-prinsip bimbingan yang secara formal telah diterima itu dapat diinternalisasikan dan diamalkan. Mungkin juga terletak dalam bidang informasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Cribbin, di Amerika Serikat sendiri prinsip-prinsip bimbingan itu kurang diinformasikan kepada para calon konselor, mungkin di Indonesia demikian juga.

3. Aspek Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor orientasi nilai budaya mempunyai sumbangan yang menonjol terhadap penerapan prinsip-prinsip bimbingan di dalam kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh para dosen pembimbing pada beberapa perguruan tinggi negeri. Nampaknya dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan IKIP, lebih cenderung meneliti sikap dan kurang perhatian terhadap masalah nilai budaya. Atas dasar kesimpulan di atas, nampaknya pemikiran-pemikiran yang relevan dari para budayawan perlu diberi porsi yang lebih besar dalam penelitian-penelitian kependidikan pada umumnya, bimbingan pada khususnya.

Implikasi penelitian lainnya yang dipandang perlu dikemukakan di dalam kesempatan ini ialah perlunya diamati seberapa jauh tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan itu jika dilihat dari sisi lain, yaitu sisi mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan bimbingan. Demikian juga dari sisi para administrator beserta staf pengajar lainnya.

D. Rekomendasi

Memperhatikan hasil penelitian, kesimpulan, pembahasan, dan implikasi penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini sebagaimana dikemukakan di muka, penyusun memberanikan diri mengajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip Bimbingan

Mengingat bahwa prinsip-prinsip bimbingan itu merupakan falsafah, pedoman, dan ciri-ciri program serta kegiatan bimbingan, dan mengingat pula bahwa prinsip-prinsip bimbingan yang ada dewasa ini bersumber pada budaya Amerika Serikat yang tidak persis sama dengan budaya Indonesia, seyogyanya jika segera disusun suatu prinsip-prinsip bimbingan yang bersumber pada budaya Indonesia. Rekomendasi ini pertama-tama ditujukan kepada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), dengan harapan agar IPBI mempunyai bahasa yang sama di dalam mengembangkan profesi dan kegiatan bimbingan di Indonesia. Kedua kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dengan harapan agar Ditjen PT memiliki buku pedoman program bimbingan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

2. Nilai Budaya

Mengingat bahwa sumbangan nilai budaya terhadap penerapan prinsip-prinsip bimbingan lebih menonjol dibanding dengan sikap terhadap bimbingan, dan memperhatikan bahwa kecenderungan penelitian-penelitian di lingkungan IKIP lebih tertuju kepada faktor sikap, seyogyanya apabila IKIP

di dalam mengembangkan penelitian-penelitiannya menaruh minat yang lebih besar terhadap faktor nilai budaya. Lebih-lebih apabila diperhatikan bahwa pendidikan merupakan ilmu terapan yang mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif serta menanggulangi kemungkinan berkembangnya nilai-nilai budaya yang negatif.

3. Pengadaan Tenaga Bimbingan

Memperhatikan hasil penelitian ini secara keseluruhan yang mengungkapkan bahwa tingkat penerapan prinsip-prinsip bimbingan baru mencapai tingkat antara mekanis dan rutin yang berarti bahwa upaya-upaya bimbingan belum disesuaikan dengan kondisi dan situasi kampus dan perkembangan mahasiswa, dan mengingat bahwa bimbingan modern hanyalah mungkin diselenggarakan oleh tenaga profesional bimbingan, hendaklah dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif bagi pengadaan tenaga bimbingan profesional.

4. Praktek Bimbingan

Memperhatikan bahwa pertalian antara prinsip-prinsip bimbingan, nilai budaya, dan sikap terhadap bimbingan di dalam penelitian ini memperlihatkan hubungan yang cukup berarti, seyogyanya apabila di dalam praktek bimbingan ketiga variabel itu memperoleh perhatian para pembimbing. Rekomendasi ini ditujukan kepada Bapak-Ibu Dosen Pembimbing yang oleh perguruan tinggi masing-masing telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan demi keberhasilan mahasiswa baik sebagai individu maupun warga masyarakat yang sedang dan akan terus membangun masa depannya.